



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR:152/KMA/SK/IX/2011

TENTANG
PENUNJUKAN TIM KUNJUNGAN KE BELANDA DALAM RANGKA
MENINDAKLANJUTI HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG RI DAN
MAHKAMAH AGUNG BELANDA (HOGE RAAD), LEMBAGA NASIONAL PELATIHAN PARA
HAKIM DAN JAKSA PENUNTUT UMUM BELANDA (SSR ZUTPHEN), KOMISI YUDISIAL DAN
PENGADILAN PAJAK BELANDA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama yang terjalin antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Belanda, SSR Zutphen, Hoge Raad, dan Pengadilan Pajak Belanda, maka di rasakan perlu untuk melakukan kunjungan ke institusi di Belanda tersebut untuk membahas lebih lanjut rencana program kerjasama yang akan dilaksanakan
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini di pandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut
 - c. Bahwa dalam DIPA Badan Litbang Diklat Kumdil, Badan Urusan Adminsitration dan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tahun 2011 telah menyediakan biaya untuk keperluan tersebut

- Mengingat :**
1. Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang No. 14 Tahun 1985;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. DIPA Badan Litbang Diklat Kumdil, Badan Urusan Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun 2011;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menunjuk Tim Kunjungan ke Belanda sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dengan tugas :
1. Mengadakan pertemuan dan wawancara dan diskusi dengan para Pejabat terkait dengan topik/ agenda sebagai berikut :
 - a. Hogeraad : Membahas Sistem Kamar, pengembangan Sistem Yurisprudensi, pengembangan legal/ informasi pengadilan dan Manajemen Perkara
 - b. Komisi Yudisial : Kemandirian Anggaran di Pengadilan Belanda
 - c. SSR – Zutphen : Penguatan hubungan kerjasama antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung Belanda dan Mahkamah Agung RI
 - d. Pengadilan Pajak : Pengembangan Kerjasama Pengadilan Pajak Belanda terkait dengan Reformasi Pengadilan Pajak di Indonesia
 2. Melakukan evaluasi dan kajian terhadap hasil - hasil kunjungan tersebut dan hal-hal lain yang di anggap perlu;
- KEDUA :** Biaya yang berkaitan dengan kunjungan ke Belanda ini dibebankan pada DIPA Badan Litbang Dilat Kumdil, Badan Urusan Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dukungan lembaga Donor;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2011

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

HARIFIN A. TUMPA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

NO. : 152/KMA/SK/IX/2011

SUSUNAN TIM KUNJUNGAN KE BELANDA

Dalam Rangka Menindaklanjuti Hubungan Kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad), Lembaga Nasional Pelatihan Para Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Belanda (SSR Zutphen), Komisi Yudisial Belanda, Pengadilan Pajak Belanda

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Harifin A. Tumpa., SH., MH	Ketua Mahkamah Agung RI
2	Dr. Ahmad Kamil SH. M.Hum	Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
3	Prof. Dr. Paulus E. Lotulung., SH	Ketua Muda Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
4	Dr. Artidjo Alkostar., SH., LLM	Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI
5	Dr. H. Muhammad Saleh., SH., MH	Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI
6	H.M Imron Anwari SH., SpN., MH	Ketua Muda Militer Mahkamah Agung RI
7	Syamsul Ma'arif SH., LLM	Hakim Agung Mahkamah Agung RI
8	Suhadi., SH., MH	Panitera Mahkamah Agung RI
9	H.M Syarifuddin., SH., MH	Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
10	I.G Agung Sumanatha., SH., MH	Kepala Pusdiklat Tehnis Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2011



HARIFIN A. TUMPA